



RILIS
KUNJUNGAN KERJA (KUNKER) SPESIFIK BIDANG PENDIDIKAN
KOMISI X DPR RI KE PROVINSI BALI
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024—2025
TANGGAL 26—28 AGUSTUS 2024

Komisi X DPR RI melakukan Kunker Spesifik Bidang Pendidikan ke Provinsi Bali dipimpin oleh Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P. Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi Partai Golkar beserta Anggota Komisi X DPR RI dari perwakilan berbagai Fraksi dan didampingi oleh pejabat Kemendikbudristek RI. Kunjungan tersebut diterima oleh Drs. Dewa Made Indra, M.Si, selaku Sekda Provinsi Bali, Kepala Dinas Pendidikan baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan di Provinsi Bali.

Pada pertemuan tersebut, Sekda Provinsi Bali mengatakan, penerimaan peserta didik baru (PPDB) dilakukan sesuai dengan regulasi dan memprioritaskan siswa miskin, yatim piatu, dan penyandang disabilitas untuk diterima. Pemerintah Provinsi Bali juga membentuk tim pengawas PPDB yang terdiri atas berbagai pihak, yakni dari Pemda, media, ombudsman, dinas sosial, LSM daerah, dan sebagainya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali mengemukakan, pelaksanaan PPDB tahun ini berjalan dengan baik jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Pejabat Kemendikbudristek RI mengemukakan, pihaknya membuka kanal aduan permasalahan PPDB dan dari aduan yang masuk, tidak terdapat aduan dari Provinsi Bali. Meski demikian, Kepala Disdikpora Provinsi Bali mengemukakan masih terdapat kendala, yakni kurangnya pemahaman terhadap pedoman dan petunjuk teknis PPDB, kurangnya sebaran sekolah dalam suatu wilayah, keakuratan dan kelengkapan data peserta didik, jarak antara rumah dan sekolah yang jauh, perubahan domisili secara mendadak, serta sekolah yang berada di zona padat penduduk seringkali kesulitan dalam menampung semua calon peserta didik yang berdomisili di wilayah tersebut.

Pertemuan juga mendiskusikan mengenai pelaksanaan kebijakan merdeka belajar di Provinsi Bali. Kepala Disdikpora Provinsi Bali menyebutkan bahwa kebijakan tersebut telah memberikan fleksibilitas dan sudah sesuai dengan kearifan sekolah sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Salah seorang kepala sekolah di Kuta Selatan juga mengatakan bahwa dengan terpilihnya sekolah tersebut sebagai sekolah penggerak, peserta didiknya banyak terlibat pada berbagai event yang diselenggarakan.

Komisi X DPR RI mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam hal penyelenggaraan pendidikan. Selain pelaksanaan PPDB dan kebijakan merdeka belajar yang menjadi fokus bahasan dalam pertemuan tersebut, Pemprov Bali dan pemda kabupaten/kota secara konsisten telah mengalokasikan lebih dari 20% APBD untuk sektor pendidikan. Komisi X DPR RI mencatat seluruh masukan yang disampaikan pada forum pertemuan dan akan menjadi bahan dalam melakukan pembahasan bersama pemerintah pada rapat kerja yang akan datang.

Denpasar, 27 Agustus 2024

Tim Kunker Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI ke Provinsi Bali.